KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM MENANGANI PASCA BENCANA TANAH LONGSOR KOTA SEMARANG

Fadhly Firman Syafrudin, Dyah Lituhayu

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jalan Prof Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465407
Laman : www.fisip.undip.ac.id
Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The high frequency of landslide disasters occurring in the upper area of Semarang City requires coordinated and integrated post-disaster management. This study aims to analyze the coordination between the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Semarang City and other local government agencies (OPD), as well as to identify the inhibiting factors in the coordination process. This study focuses on inter-agency coordination in post-landslide disaster management within the governmental scope, while previous studies have primarily focused on government collaboration, disaster mitigation, and emergency disaster response. This research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, literature studies, and documentation. The results show that post-landslide disaster management has been carried out by utilizing information technology, such as WhatsApp Groups and the Lapor Semar platform, to accelerate information exchange. The existence of the Disaster Risk Reduction Forum (FPRB) also serves as an important forum for uniting efforts between volunteers and government agencies. Several coordination barriers were identified, including lengthy bureaucratic procedures in distributing unexpected expenditure funds (BTT), situational coordination patterns, and the absence of routine coordination schedules. The novelty of this study lies in its focus on post-landslide disaster coordination among local government agencies in Semarang City, emphasizing vertical and horizontal coordination patterns within the context of post-disaster rehabilitation and reconstruction. This study concludes that coordination requires stronger functional integration, bureaucratic simplification, disaster training and simulations, and the establishment of routine coordination schedules to improve the effectiveness of post-disaster management.

***Keywords** : Coordination, BPBD, Landslide, Post Disaster Management, Semarang city*

ABSTRAK

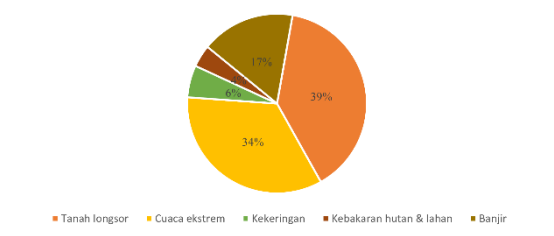
Tingginya frekuensi bencana tanah longsor di Kota Semarang yang terjadi di wilayah semarang atas, menuntut penanganan pasca bencana yang terkoordinasi dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk koordinasi antara BPBD Kota Semarang dengan OPD lain dan mengidentifikasi faktor penghambat proses koordinasi tersebut. Penelitian ini mengambil fokus pada koordinasi antara OPD dalam penanganan pasca bencana tanah longsor di lingkup pemerintahan dan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada kolaborasi pemerintah, mitigasi bencana dan penanganan tanggap darurat bencana. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan pasca bencana tanah longsor sudah berjalan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti Whatsapps Group, platform lapor semar untuk mempercepat pertukaran informasi. Keberadaan forum FPRB menjadi wadah penting dalam menyatukan langkah antara relawan dan instansi pemerintah. Ditemukan beberapa hambatan koordinasi, seperti prosedur birokrasi penyaluran BTT yang panjang, pola koordinasi yang bersifat situasional, belum tersedianya jadwal koordinasi rutin. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian koordinasi pasca bencana tanah longsor antar OPD di Kota Semarang yang menitikberatkan pada pola koordinasi vertikal dan horizontal dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koordinasi memerlukan penguatan integrasi fungsi, penyederhanaan birokrasi, pelatihan dan simulasi bencana, pembuatan jadwal koordinasi untuk meningkatkan keberhasilan penanganan pasca bencana.

Kata Kunci : Koordinasi, BPBD, Tanah Longsor, Penanganan Pasca Bencana, Kota Semarang

PENDAHULUAN

Terjadi peningkatan bencana alam tanah longsor di Kota Semarang dalam kurun waktu 2020 – 2023 dengan total 88 kejadian tanah longsor (BNPB, 2023). Frekuensi bencana yang meningkat ini menimbulkan kerugian material, korban jiwa dan mengganggu rasa aman masyarakat. Tanah longsor adalah kejadian alam akibat pergerakan massa tanah atau batuan dengan berbagai variasi, seperti runtuhan batu atau gumpalan tanah yang besar (Ruyani, 2023).

Gambar 1.1 Grafik Kejadian Bencana Bencana Kota Semarang 2020 - 2023



Sumber : Data yang telah diolah oleh penulis, 2025

Topografi tanah di kota semarang yang cukup beragam dengan memiliki dataran rendah, dataran tinggi dan wilayah pesisir. Wilayah semarang atas memiliki morfologi perbukitan yang membuat wilayah tersebut rawan terjadinya tanah longsor. tanah longsor di Kota Semarang terbagi menjadi dua jenis, yaitu rawan

gerakan tanah dan daerah sesar aktif. Tanah longsor ini terbagi menjadi beberapa wilayah kecamatan di Kota Semarang, yaitu kecamatan gunungpati, banyumanik.

Tanah longsor di Kota Semarang dibagi menjadi 3 peta risiko tanah longsor, yaitu rendah, sedang dan merah. Kota Semarang secara rata rata terbagi menjadi peta risiko sedang yang di dominasi oleh kecamatan gunung pati, banyumanik, mijen, tembalang, ngaliyan dan sebagian kecamatan candisari. Penyebab terjadinya tanah longsor di Kota Semarang disebabkan oleh curah hujan tinggi, kondisi perbukitan dataran tinggi dan perubahan alih fungsi lahan dari kawasan hijau menjadi kawasan terbangun (Masyhuri et al., 2021). Perubahan penggunaan lahan tersebut berdampak langsung pada menurunnya daya serap air tanah dan meningkatkan risiko bencana tanah longsor.

Gambar 1.2 Peta Risiko Bencana Longsor Kota Semarang



Sumber : BNPB, 2025

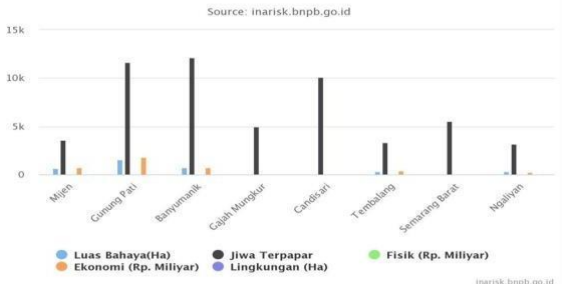
Kecamatan di Kota Semarang yang paling sering mengalami tanah longsor adalah kecamatan Gunungpati. Selama kurung waktu 2020 – 2023 Kecamatan gunungpati sering mengalami bencana tanah longsor dengan kategori risiko tinggi. Risiko tinggi ini didasarkan pada wilayah bahaya paling luas ketika terjadi bencana tanah longsor (BPBD Kota Semarang, 2023).

Peningkatan bencana tanah longsor di Kota Semarang yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhinya . Faktor pertama beban tanah atau tekanan yang berasal dari bangunan di atasnya, faktor kedua kondisi lereng dengan tingkat kemiringan yang tinggi, dan faktor ketiga, yaitu curah hujan tinggi serta hilangnya vegetasi untuk menahan luncuran tanah (BPBD Kota Semarang, 2023).

Hal ini ditunjukkan melalui adanya peta grafik potensi longsor yang diukur melalui 5 indikator, seperti luasan bahaya, jiwa terpapar, harga bangunan fisik, nilai ekonomi dan nilai lingkungan. Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada kecamatan gunung pati karena memiliki topografi perbukitan dan lereng curam yang menyebabkan tingkat kerawanan longsor relatif tinggi. Gunung pati termasuk wilayah semarang atas yang mengalami perubahan fungsi lahan sehingga rentan

terhadap bencana tanah longsor terutama saat curah hujan tinggi.

Gambar 1.3 Grafik Potensi Longsor Tahun 2023 - 2027



Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Semarang 2023 - 2027

BPBD Kota Semarang sebagai lembaga yang bertugas untuk melaksanakan penanggulangan bencana melalui peraturan daerah kota semarang nomor 13 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Upaya penanganan pasca bencana belum optimal dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya, belum lengkapnya pedoman teknis dan rehabilitasi rekonstruksi belum berjalan maksimal. Beberapa kasus di Kota Semarang di kelurahan manyaran belum mendapatkan penanganan pasca bencana yang optimal dan hanya bersifat sementara.

Penanganan pasca bencana memerlukan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Disperkim, Kecamatan dan kelurahan. Koordinasi dilakukan untuk pertukaran informasi, pembagian tugas, penyaluran bantuan sampai dengan perbaikan infrastruktur pasca bencana. Namun koordinasi masih menghadapi hambatan masalah administrasi, keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya integrasi antar OPD sehingga penanganan pasca bencana belum optimal.

Gambar 1.4 Longsoran Manyaran



Sumber : Radar Semarang Jawa Pos, 2025

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang kolaborasi pemerintah, mitigasi dan tanggap darurat bencana. Penelitian ini berfokus pada koordinasi antar OPD dalam penanganan pasca bencana tanah longsor di Kota Semarang kecamatan gunungpati dan mengidentifikasi faktor penghambatnya.

KERANGKA TEORI

a. Manajemen Publik

Manajemen publik adalah bidang interdisipliner ilmu yang menggabungkan fungsi manajemen yaitu perencanaan,

pengorganisasian, pengawasan, sumber daya manusia, keuangan fisik, informasi dan politik (Keban, 2022). Teori ini sesuai dengan penelitian ini karena koordinasi termasuk dalam teori manajemen yang terbagi menjadi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*staffing*), penyusunan staf (*directing*), koordinasi (*coordinating*), pelaporan (*reporting*) dan penganggaran (*budgeting*) (Madjid, 2023).

b. Koordinasi

Koordinasi merupakan wewenang untuk mengarahkan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan berbagai aktivitas yang berbeda – beda agar seluruhnya berjalan searah menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu (Ndraha, 2015). Teori ini membahas tentang koordinasi di ranah pemerintahan dan sesuai dengan penelitian ini yang membahas koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam penanganan pasca bencana.

c. Tanah Longsor

Longsor diartikan sebagai bentuk erosi yang menyebabkan pengangkutan dan pemindahan tanah dalam volume besar dalam satu waktu (Uca & Maru, 2019). Tanah longsor merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kota Semarang rentang waktu 2020 – 2023.

d. Indikator Koordinasi

Penggunaan indikator koordinasi digunakan dalam rangka menganalisis keberhasilan koordinasi dan digunakan dalam koordinasi pemerintahan. Pada penelitian ini menggunakan teori dari taliziduhu ndraha yang menyebutkan terdapat 7 indikator koordinasi. Informasi, komunikasi dan teknologi. Kesadaran terhadap pentingnya koordinasi dari setiap pihak yang terlibat. Kompetensi stakeholders. Kesepakatan dan komitmen. Penetapan kesepakatan oleh pihak yang terlibat. Insentif koordinasi. Feedback (umpan balik).

e. Faktor Penghambat Koordinasi

Pada faktor penghambat koordinasi, peneliti menggunakan teori dari (handayaningrat, 2006) yang membagi hambatan koordinasi menjadi dua jenis yaitu hambatan koordinasi vertikal dan hambatan koordinasi horizontal. Hambatan koordinasi vertikal adalah hambatan yang muncul pada hubungan kerja antara atasan dan bawahan dalam struktur hierarki organisasi. Hambatan horizontal ini terjadi antar unit kerja atau pejabat yang memiliki kedudukan sejajar dan tidak berada dalam satu garis komando.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor BPBD Kota Semarang dan Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Kota Semarang. Penentuan subjek penelitian menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis hasil penelitian dan interpretasi melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.1 Peranan OPD dalam Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Tanah Longsor

No	Stakeholders/ OPD	Peranan
1	BPBD Kota Semarang	*Leading Sector* dan Koordinator utama : Menerima laporan, mobilisasi tim kedaruratan, melakukan *rapid assessment*, pemberian bantuan darurat, pengusulan BTT (bantuan tidak terduga), memfasilitasi komunikasi lintas OPD, memimpin rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana, seperti talud dan bronjong.
2	Kelurahan & Kecamatan	Unit kewilayahan tingkat pertama : melaporkan kejadian, membuat surat pengusulan perbaikan dan rehabilitasi, pengumpulan data administratif korban dan memfasilitasi tim asesmen BPBD di lapangan.
3	Dinas Pekerjaan Umum (DPU)	Pelaksana teknis untuk saluran, drainase dan penggunaan alat berat dalam penanganan longsor yang berkaitan dengan infrastruktur.
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim)	Penanganan perbaikan permukiman dan pembangunan kembali rumah/perumahan yang terdampak longsor.
5	Dinas Sosial (Dinsos)	Membantu BPBD dalam penyelenggaraan dapur umum, logistik pengungsian dan layanan selama tanggap darurat.
6	Badan Pengelola Keuangan Aset	Verifikasi administrasi dan pencairan dana BTT berdasarkan

No	Stakeholders/ OPD	Peranan
	Daerah (BPKAD)	pedoman pelaksanaan pemberian bantuan sosial terdampak bencana.
7	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan saat kondisi darurat berupa (ambulance hebat) untuk penanganan korban bencana.
8	BPBD Provinsi/BPBD Daerah Perbatasan	Koordinasi lintas daerah bila kejadian memerlukan bantuan wilayah lain (misal pompa air atau alat kedaruratan yang lain).
9	Basarnas, BNPB (Pusat)	Operasi pencarian dan penyelamatan korban, pendampingan kebijakan, bantuan logistik nasional.
10	Relawan (Tagana, KSB, FPRB)	Pelapor awal kejadian bencana dan mitra komunikasi BPBD di tingkat wilayah kelurahan/kecamatan.

Sumber : Data yang telah diolah oleh penulis, 2025

Indikator Koordinasi

a. Informasi, komunikasi dan teknologi

Komunikasi dalam koordinasi penanganan pasca bencana tanah longsor dimulai dari laporan masyarakat dan relawan, seperti KSB, TAGANA kepada BPBD Kota Semarang. Relawan di tingkat kelurahan kecamatan memiliki peran penting dalam penyampaian informasi awal terkait lokasi dan kondisi bencana. FPRB membantu proses komunikasi dan koordinasi antara relawan dan OPD teknis sehingga penanganan pasca bencana dapat dilakukan secara bersama dan terarah. Koordinasi antar OPD melibatkan pembagian peran masing masing dan penggunaan teknologi, seperti media sosial, platform lapor semar dan komunikasi forum FPRB

b. Kesadaran terhadap pentingnya koordinasi setiap pihak yang terlibat

Relawan memiliki peran penting dalam pelaporan awal kejadian tanah longsor di Kota Semarang sesuai wilayah masing masing. BPBD setelah menerima laporan akan melakukan penanganan sementara berupa pemberian terpal untuk mencegah perluasan longsoran. BPBD koordinasi dengan OPD terkait, seperti DPU, Disperkim, BPKAD, Kelurahan, Kecamatan dalam proses rehabilitasi, rekonstruksi dan penyaluran BTT

c. Kompetensi stakeholders

Setiap OPD terlibat dalam penanganan pasca bencana untuk mendukung kelancaran penanganan pasca bencana. Koordinasi dilakukan untuk perbaikan infrastruktur dan penyaluran BTT. Koordinasi yang dilakukan masih bersifat situasional dan responsif, belum dilakukan secara rutin dan terjadwal. Kondisi ini menyebabkan penanganan pasca bencana cenderung bersifat reaktif dan belum optimal dalam mendukung penanganan permanen.

d. Kesepakatan dan komitmen

Kesepakatan formal sebenarnya telah ada melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Namun, penerapan peraturan tersebut di Kota Semarang belum berjalan optimal karena bencana longsor yang terjadi bersifat parsial sehingga status siaga darurat atau tanggap darurat tidak ditetapkan. Kondisi ini menyebabkan koordinasi lebih banyak dilakukan berdasarkan kesadaran masing masing stakeholders dan berpedoman pada tugas pokok serta fungsi OPD.

e. Penetapan kesepakatan oleh pihak yang terlibat

Kesepakatan koordinasi di BPBD Kota Semarang telah berjalan secara formal sesuai struktur organisasi. Dalam penanganan pasca bencana, bidang kedaruratan dan logistik terlebih dahulu melaksanakan penanganan darurat, kemudian dilanjutkan oleh bidang rehabilitasi dan rekonstruksi untuk perbaikan infrastruktur dan pemberian dana BTT. Namun, pelaksanaan kesepakatan tersebut masih memiliki kendala karena proses penanganan dilakukan secara bertahap sehingga menimbulkan kekosongan penanganan pasca bencana dan menyebabkan perbaikan permanen belum berjalan optimal.

f. Insentif koordinasi

Koordinasi penanganan pasca bencana di Kota Semarang belum terdapat mekanisme sanksi yang mengikat. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan DPU Kota Semarang lebih mengedepankan kesadaran moral, kepedulian sosial, komitmen sukarela, serta teguran informal dalam pelaksanaan koordinasi. Dalam penanganan bencana, peran pimpinan seperti walikota dan kepala OPD menjadi penting untuk memastikan koordinasi tetap berjalan melalui evaluasi dan pengawasan di lapangan. Penerapan sanksi juga bergantung pada legalitas koordinasi, seperti adanya SK tanggap darurat atau SK siaga darurat yang memiliki kekuatan hukum.

g. Feedback

BPBD Kota Semarang telah melakukan evaluasi koordinasi melalui

evaluasi internal pada masing-masing OPD dan evaluasi makro yang melibatkan OPD, pemerintah provinsi, serta instansi pusat di daerah. Evaluasi dilakukan secara situasional, terutama saat kondisi siaga darurat atau tanggap darurat, dan sebagian hasil evaluasi dipublikasikan melalui media sosial sebagai bentuk transparansi.

Evaluasi internal dilakukan untuk menilai efektivitas penanganan pasca bencana, termasuk penggunaan dana BTT dan pembangunan infrastruktur, seperti talud dan bronjong. Evaluasi ini bertujuan memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan serta membantu pemerintah mengetahui kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Faktor Penghambat Koordinasi

a. Hambatan Koordinasi Horizontal

Koordinasi BPBD Kota Semarang berjalan secara dinamis dan adaptif sesuai kondisi darurat bencana. Pimpinan BPBD berperan dalam memberikan arahan dan mengkoordinasikan penanganan pasca bencana, sedangkan pelaksana menjalankan tugas sesuai instruksi dan SOP yang telah ditetapkan. Namun, koordinasi vertikal masih menghadapi beberapa hambatan, seperti gangguan komunikasi akibat kerusakan infrastruktur, kondisi psikologis saat bencana terjadi, serta perbedaan tingkat pengetahuan dan keterampilan interpersonal. Perbedaan kemampuan dalam pendataan kerusakan rumah pasca longsor menyebabkan proses pelaporan dan penyaluran bantuan menjadi kurang optimal. Selain itu, kurangnya pelatihan dan simulasi juga mempengaruhi kesiapsiagaan personel dalam merespons situasi darurat secara cepat dan tepat.

b. Hambatan Koordinasi Vertikal

BPBD Kota Semarang berperan sebagai leading sector dalam mengkoordinasikan OPD lain, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPU, BPKAD, serta kelurahan dan kecamatan dalam penanganan pasca bencana tanah longsor. Koordinasi dilakukan dalam proses evakuasi, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan. Namun, koordinasi horizontal masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, perbedaan skala prioritas antar OPD, dan lemahnya integrasi fungsi sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan penanganan pasca bencana. Untuk mendukung koordinasi, BPBD memanfaatkan media sosial, grup WhatsApp, dan platform Lapor Semar sebagai sarana pertukaran informasi secara cepat. Selain itu, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) juga membantu memperkuat sinergi antar stakeholder melalui pelibatan relawan, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha dalam penanganan bencana berbasis komunitas.

KESIMPULAN

Koordinasi antar OPD dalam penanganan pasca bencana tanah longsor di Kota Semarang dilakukan melalui koordinasi vertikal dan horizontal yang bersifat situasional dan responsif. BPBD Kota Semarang berperan sebagai leading sector yang mengkoordinasikan berbagai OPD sesuai tugas dan fungsinya mulai dari tahap pelaporan, tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Koordinasi didukung melalui pemanfaatan teknologi komunikasi, seperti WhatsApp, media sosial, dan platform pelaporan kebencanaan serta pelibatan relawan dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).

Koordinasi ditunjukkan melalui pertukaran informasi, komunikasi, pembagian tugas, penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Namun, koordinasi belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala pada kompetensi stakeholder, kesepakatan dan komitmen, serta penetapan kesepakatan antara pihak yang terlibat. Selain itu, koordinasi masih bersifat situasional, belum rutin dan terjadwal, integrasi informasi antar OPD belum optimal, serta proses birokrasi penyaluran dana BTT yang panjang menghambat penanganan pasca bencana.

Hambatan vertikal terjadi akibat gangguan komunikasi saat kondisi darurat, kerusakan infrastruktur komunikasi, perbedaan pemahaman dan keterampilan personel, serta kurangnya pelatihan dan simulasi kebencanaan. Sementara itu, hambatan horizontal terjadi karena perbedaan prioritas antar OPD, lemahnya integrasi fungsi, keterbatasan anggaran, dan ego sektoral yang menyebabkan sinergi lintas sektor belum optimal dalam penanganan pasca bencana tanah longsor di Kota Semarang.

SARAN

a. Penyederhanaan prosedur birokrasi dalam pencairan dana BTT. BPBD dan BPKAD serta instansi kewilayahan kelurahan, kecamatan perlu memperkuat komunikasi dan penyederhanaan prosedur birokrasi agar masyarakat korban bencana dapat menerima bantuan dengan lebih cepat dan efisien.
b. Penguatan integrasi komunikasi lintas sektor. Koordinasi harus dilakukan rutin antara BPBD dengan OPD lain seperti, DPU, Dinsos, Dinkes, BPKAD, kelurahan/kecamatan untuk menyamakan persepsi dan tujuan dalam penanganan pasca bencana tanah longsor di Kota Semarang serta pengembangan sistem informasi dalam pertukaran data, informasi antar OPD secara real time.

c. Pelaksanaan dan simulasi secara rutin dan terstruktur agar setiap personel mampu meningkatkan kesiapsiagaan personel saat terjadi bencana. Latihan ini melibatkan OPD, seperti DPU, Dinsos, Dinkes, BPKAD, kelurahan/kecamatan.

d. Penyusunan jadwal koordinasi secara rutin dan terstruktur agar agenda koordinasi tidak bersifat situasional. Koordinasi ini melibatkan berbagai OPD dalam penanganan pasca bencana tanah longsor, seperti DPU, Dinsos, Dinkes,BPKAD,kelurahan/kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A. A., Dwiningtyas, H., & Rahmat, H. K. (2024). Urgensi Koordinasi dalam Organisasi Tanggap Darurat Bencana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Journal of Current Research in Disaster Response and Emergency Management*, *1*(1), 15-20.

Ali, M. S. S., Arsyad, M., Kamaluddin, A., Busthanul, N., & Dirpan, A. (2019, February). Community based disaster management: Indonesian experience. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, p. 012012). IOP Publishing.

Azzhara, Z., & Warsono, H. (2025). Analisis Manajemen Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, *14*(2), 1213-1226.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Data Bencana Tanah Longsor Kota Semarang Tahun 2020 – 2023. Diakses pada 20 Desember 2024, dari https://dibi.bnpb.go.id/superset/dashboard/2/

BPBD Kota Semarang. (2023). *Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Semarang Tahun 2023 - 2027.*

BPBD Kota Semarang. (2023). *Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Semarang Tahun 2023 - 2027*.

Davis, R. S., Moldavanova, A. V., & Stazyk, E. C. (2020). A tribute to H. George Frederickson – One of public administration's modern-day founding fathers. *Journal of Public Affairs Education*, *26*(3), 256–263.https://doi.org/10.1080/15236803.2020.1809243

Grasia, E., Kismartini, K., & Maesaroh, M. (2023). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, *12*(3), 178-192.

Handayaningrat, S. (2006). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. PT Gunung Agung.

Keban, Y. T. (2022). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan isu* (1st ed.). Penerbit Gava Media.

Kinanti, A., Awaluddin, M., & Yusuf, M. A. (2022). Analisis Pemetaan Risiko Bencana Tanah Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kecamatan Candisari, Kota Semarang). *Jurnal Geodesi Undip*, *11*(3), 1–10.

Lubis, F. W., Sabarina, Y., & Masril, M. (2019). Penanganan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Ditinjau dari Aspek Komunikasi dan Koordinasi. *Jurnal*

Simbolika: Research and Learning in Communication Study, *5*(1), 1. https://doi.org/10.31289/simbollika.v5i1.2258

Madjid, U. (2023). *Pengantar Ilmu Administrasi* (S. PSL (ed.); 1st ed.). PT Pustaka Interes Media Amani.

Masyhuri, A., Purnaweni, H., Herawati, A. R., & Priyadi, B. P. (2021). Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *4*(2), 854–862. https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.759

Monica, C. (2022). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dengan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Upaya penanggulangan Pasca Bencana Banjir Di Kota Medan. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, *9*(2), 327-334.

Muzdalifah, S., Mafriana, S. B., Sompa, A. T., & Attijani, M. K. (2023). Efektifitas koordinasi badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) provinsi dalam penanggulangan banjir di kalimantan selatan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, *8*(2), 238-249.

Ndraha, T. (2015). *Kybernology* (T. Ndraha (ed.); 2nd ed.). PT Rineka Cipta.

Ruyani. (2023). *Tanah Longsor Seri Fenomena Alam dan Mitigasi* (B. Retmizola (ed.); 1st ed.). PT. Bumi Aksara.

Ruyani. (2023). *Tanah Longsor Seri Fenomena Alam dan Mitigasi* (B. Retmizola (ed.); 1st ed.). PT. Bumi Aksara.

Setiawati, N. A. (2018). Koordinasi Antar Instansi Dalam Inovasi Layanan Pengaduan Darurat Command Center 112 Di Kota Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, *6*(1), 1-11.

Taslim, M., Pasaribu, A. J., & Samudra, A. A. (2024). Analisis Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Tangerang Selatan. *Media Bina Ilmiah*, *18*(8), 2187-2202.

Uca, & Maru, R. (2019). Mitigasi Bencana Pemetaan dan Zonasi Daerah Rawan Longsor dan Banjir. In *KBBI Daring*. Media Nusa Creative.

Wahyudi, B., Muradi, M., & Yuningsih, N. Y. (2024). Koordinasi Pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *6*(4), 845-858.

Wassalim, F. R. (2025, September 18). Sudah 5 Tahun, Talut Longsor di Roro Jonggrang Timur Semarang Belum Ada Perbaikan, Begini Kondisinya. *RadarSemarang.Jawapos.Com*. https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/725758725/sudah-5-tahun-talut-longsor-di-roro-jonggrang-timur-semarang-belum-ada-perbaikan-begini-kondisinya?

Yassar, M. F., Nurul, M., Nadhifah, N., Sekarsari, N. F., Dewi, R., Buana, R., Fernandez, S. N., & Rahmadhita, K. A. (2020). Penerapan Weighted Overlay Pada Pemetaan Tingkat Probabilitas Zona Rawan Longsor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. *Jurnal Geosains Dan Remote Sensing*, *1*(1), 1–10. https://doi.org/10.23960/jgrs.2020.vi